

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi dan permasalahan bagi berbagai aspek kehidupan saat ini. Kasus covid-19 saat ini terus meningkat secara global dan tidak terkecuali di Indonesia. Dilansir dari portal resmi penanganan Covid 19 Indonesia, (covid19.go.id) menyatakan bahwa per 5 November 2020 jumlah kasus di Indonesia telah mencapai 426 ribu kasus dan diperkirakan masih terus berlanjut. Karena hal inilah pemerintah tidak tinggal diam dalam menindaklanjuti penanganan kasus pandemi covid-19. Sejak awal ditemukannya kasus pertama pada 2 Maret 2020 dilansir dari kompas.com Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan regulasi dan kebijakan dalam upaya penanganan dan pencegahan. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19 yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan masyarakatnya untuk keluar masuk daerah masing-masing dalam upaya meminimalisir penyebaran virus (Pakpahan, 2020). *Sosial distancing* (Pembatasan sosial), adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk

menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, contohnya seperti Penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum (Dito Nasution, 2020).

Pada awalnya kebanyakan masyarakat mendukung diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena dianggap sebagai langkah tepat untuk mencegah dan mengurangi angka masyarakat yang terjangkit virus. Namun pada kenyataannya melaksanakan kebijakan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dari sebuah riset (Wibowo,Nasruddin dan Haq, 2020) menyatakan mengenai kerugian ekonomi nasional akibat PSBB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu ataupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan COVID-19, maka lakukanlah dengan benar, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak, berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Bila itu yang terjadi, maka penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial. Adapun riset yang dilakukan oleh Sylvia Hasanah Thorik mengenai Efektivitas

Pembatasan Sosial Berskala besar di Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSBB diyakini merupakan cara paling ampuh dalam menekan laju penularan pandemi covid-19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang. Disisi lain, kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. (Thorik, 2020: 118).

Apa yang dikemukakan oleh para ahli memang bukan tanpa alasan, dalam penerapannya PSBB memang dinilai ampuh untuk menekan angka penyebaran virus covid-19, tetapi jika kebijakan ini salah langkah dan preventifnya tidak digalakkan secara serentak di berbagai daerah maka masalah-masalah lain akan timbul sebagai akibat dari pembatasan masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka. Pandemi covid-19 yang telah menyebarluas dan berkepanjangan ini pada akhirnya membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Pakpahan (2020) menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Dari sektor Perdagangan, penerimaan pajak sektor perdagangan mengalami penurunan yang besar, padahal sektor ini

memiliki kontribusi pajak terbesar kedua dalam penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena China merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran Virus Corona juga mengakibatkan Penurunan produksi di China, padahal China Menjadi Pusat produksi barang dunia. (Nasution, 2020). Di sektor Investasi pandemi covid-19 juga memiliki pengaruh besar dalam siklus investasi dalam negeri, hal ini dikarenakan masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Investor yang ingin menanamkan sahamnya sewaktu-waktu bisa menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah. (Silpa Hanoatubun, 2020). Sektor Pariwisata juga tak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong atau sebesar 12.8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang tahun 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata seperti restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi covid-19. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Jakarta, Medan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Manado dan Bali. Pandemi COVID-19 juga

diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cinderamata untuk di bawa pulang (Iswahyudi, 2016). Jika pengunjung asing yang berkunjung turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil dan menengah juga akan turun (Saidi *et al*, 2017). Bank Indonesia telah merilis data di tahun 2016 terkait sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sangat dominan dalam unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro mampu menyerap banyak tenaga kerja (Nasution dkk, 2020).

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) (Pakpahan, 2020). Disisi lain kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi

negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. (Santoso, 2020).

Dapat dilihat beberapa regulasi yang di keluarkan oleh Pemerintah memang cukup aktualitatif dalam penanganan kasus namun tidak cukup sistematis dalam memperhitungkan berbagai risiko yang ada. Terlebih baru-baru ini, sebuah studi menyebut jika Covid-19 akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. (Maucash.id).

Dalam sebuah artikel dari Maucash.id menyebutkan beberapa dampak akibat kebijakan yang diberlakukan pemerintah bagi keberlangsung UMKM di Indonesia, yakni pertama adalah penurunan aktivitas Jual-Beli. Anjuran *social distancing* demi menghindari penularan virus Corona yang lebih luas, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual-beli di tengah masyarakat. Contohnya pelaku usaha warteg di Jakarta. Menurut ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, virus Corona telah membuat omset pengusaha warteg di Indonesia, khususnya Jabodetabek mengalami penurunan hingga 50 persen. Namun beruntung, menurut penelitian yang dilakukan *Center for Economic and Social Studies* (CESS) dan

The Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), UKM di Indonesia tergolong unik karena selalu punya kemampuan untuk berkembang dan bertahan selama krisis. Hal ini terbukti dengan inisiatif para pengusaha warteg yang lebih memilih untuk tetap beroperasi, namun merubah cara berjualan dengan hanya melayani pembelian kemasan (untuk dibawa pulang), tidak melayani pembelian makan di tempat. Yang kedua adalah Bahan baku sulit didapat. Kebijakan *social distancing* yang dipilih pemerintah Indonesia, telah membuat aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan *Work From Home*, beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya, hingga PHK massal. Menurut data terbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, sebanyak 30.137 pekerja dilaporkan harus kehilangan pekerjaan karena PHK massal, sedangkan 132.2799 pekerja lainnya kehilangan penghasilan karena dirumahkan tanpa upah. Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat penurunan kapasitas produksi mengalami penurunan ekstrem. Diinginkan atau tidak, kondisi ini telah menyebabkan bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan, atau mengalami kenaikan harga yang ekstrem. Misalnya sektor UKM pembuat kue dan roti yang dipusingkan dengan melambungnya harga telur dan gula pasir. Akibatnya, harga jual produk pun ikut dinaikkan. Pilihan ini tergolong berisiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang lesu.

Dampak berikutnya yakni Distribusi Terhambat. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan jalur distribusi ke seluruh Indonesia lewat pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia. Proyek tersebut bahkan sudah dimulai sejak Presiden Joko Widodo menjabat di periode pertama. Hasilnya cukup signifikan, jalur distribusi menjadi lebih cepat, kesenjangan harga bisa dipangkas, dan laju perekonomian rakyat juga semakin kencang. Namun kini, Covid-19 telah ‘menghancurkan’ semua itu. Menurut data Asosiasi Tol Indonesia (ATI), lalu-lintas harian rata-rata (LHR) seluruh jalan tol di Indonesia mengalami penurunan antara 40-60 persen sejak awal Maret 2020. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan pelaku bisnis UKM. Mereka kini kebingungan mencari cara mendistribusikan produk, terlebih bagi UKM yang sudah mulai memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah, atau bahkan lintas pulau. Dan dampak yang tidak pernah diperkirakan yaitu Penyedia Jasa Ikut Terpapar Dampak Covid-19 Tidak hanya UKM yang bergerak di sektor produksi rumahan, mereka yang bergerak di bidang jasa pun dilaporkan mengalami penurunan omset yang signifikan.

Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen

melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah dari jumlah 56 persen terjadinya penurunan penjualan ini jugalah yang dapat kita lihat nyata bahwa indonesia sedang berada dalam jurang resesi (Rahman, 2020). Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 mencatatkan minus hingga 3,49 persen secara tahunan (Pakpahan, 2020). Artinya dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan domestik Bruto atau (PDB) mencatatkan pertumbuhan negatif yang menandakan Indonesia sedang dalam masa resesi. Hal ini juga menjelaskan seberapa lesunya aktivitas perekonomian, perdagangan dan perputaran uang yang terjadi dalam negeri yang juga seakan menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat menurun yang sangat berdampak pada keberlangsungan UMKM saat ini.

Hal serupa terjadi pada UMKM yang terletak di kabupaten Bangkalan Kecamatan Burneh bernama Athaya Batik Collection. UMKM yang bergerak di bidang distribusi produk kearifan lokal seperti batik ini juga terdampak dalam segi pengembangannya. Pembatasan-pembatasan yang terjadi mengakibatkan alur distribusi barang terhambat, bahkan beberapa diantaranya harus menutup usaha mereka sementara waktu ketika anjuran PSBB di keluarkan pemerintah daerah. meskipun UMKM ini telah mengenal platform online seperti *website* dan *social media*, namun tetap saja

kegiatannya juga terdampak dengan menurunnya angka penjualan secara drastis..

Para pengrajin yang juga tergabung dalam UMKM ini tak pelak juga terdampak. Khususnya karena sistem kompensasi yang diterapkan oleh Athaya Batik cukup berbeda. Dari informasi sementara yang di dapat penulis, Athaya Batik Madura mencoba memberikan opsi pilihan kepada para pengrajinnya yang sejauh ini berjumlah 25 pengrajin yang tersebar di 3 tempat berbeda, yaitu di kecamatan Tanjung bumi, Pamekasan dan Sumenep. Dimana pemilik galeri menyatakan bahwa terdapat dua sistem kompensasi berbeda yakni kompensasi berupa upah dan sistem kompensasi Bagi Hasil. Untuk yang Upah pengrajin kebanyakan akan memproduksi barang secara berkala dan konstan yang kemudian akan di tawarkan kepada pemilik Galeri atau bahkan atas pesanan dari pemilik galeri, hal ini lantaran beberapa dari mereka adalah pengrajin tetap Athaya Batik Madura dimana pemilik galeri akan memberikan upah atau insentif dimuka, sedangkan kompensasi bagi hasil adalah ketika setiap ada barang terjual maka kompensasi mereka dapatkan berdasarkan kesepakatan antara pengrajin dengan pemilik galeri. Hal ini tentu menjadi masalah utama ketika pandemi terjadi, kelesuan ekonomi terus meroket, konsumsi masyarakat juga ikut menurun tak terkecuali dengan produk seperti batik.

Dari hasil diskusi timbul permasalahan ketika adanya ketimpangan antara pengrajin yang memilih kompensasi sistem insentif dan Bagi hasil, baik dari segi produktivitas, motivasi dan loyalitas, dimana pemilik galeri berpendapat bahwa Sistem Kompensasi Bagi hasil memiliki prospek lebih baik bagi Pengrajin, namun tidak semua pengrajin berpikir hal yang sama. Lantas bagaimanakah pemilik galeri meyakinkan para pengrajin untuk beralih menggunakan sistem kompensasi bagi hasil akan diulas selama proses penelitian termasuk dengan apakah benar pendapat pemilik dapat meyakinkan para pengrajin sehingga mampu meningkatkan produktivitas mereka. Pembahasan tentang keberlanjutan galeri selama masa pandemi menjadi ulasan yang amat menarik, apakah para pengrajin tetap mendapatkan penghasilan atau tidak, dan jika pandemi ini seakan tidak akan cepat usai lantas apakah baik bagi UMKM untuk tetap menerapkan sistem kompensasi bagi hasil dalam menyokong para pengrajin untuk tetap produktif. Hal ini lah yang mendasari penulis untuk mengangkat judul penelitian “Kompensasi Bagi Hasil Memotivasi Produktivitas Pengrajin Batik Athaya Batik Madura di Masa Pandemi COVID-19”. Dengan harapan bahwa melalui penelitian kualitatif yang penulis lakukan, penulis dapat melihat sudut pandang UMKM dalam tetap mempertahankan eksistensinya selama masa krisis berlangsung, selain itu penulis juga berharap dari hasil penelitian ini mampu mendapatkan jalan keluar

dan saran bagi pelaku UMKM dalam pengembangan sumber daya manusia supaya tetap produktif di masa pandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penerapan Sistem Kompensasi Bagi Hasil di UMKM Athaya Batik Madura?
- b. Bagaimana Pengusaha Memotivasi Pengrajin Sehingga Dapat Meningkatkan Produktivitas?
- c. Bagaimana Sistem Kompensasi Bagi Hasil Dapat Meningkatkan Produktivitas?

1.3 Tujuan

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian maka setiap peneliti sudah seharusnya memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut :

- a. Untuk memahami penerapan sistem Kompensasi Bagi Hasil di UMKM Athaya Batik Madura.
- b. Untuk mengetahui cara-cara pengusaha untuk tetap memotivasi pengrajin agar dapat meningkatkan produktivitas pegrajin.
- c. Untuk memahami cara kerja kompensasi bagi hasil dalam meningkatkan produktivitas pengrajin.

1.4 Manfaat

Adapun Manfaat yang ingin penulis hasilkan dari peneitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagi pemilik ataupun pengelola UMKM dan galeri Athaya Batik Madura, agar dapat memiliki referensi dalam memutuskan sistem kompensasi yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19.
- b. Bagi para pelaku UMKM khususnya para pelaku UMKM yang bergerak di bidang produk lokal dan galeri agar mampu menelaah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing UMKM sebagai bahan untuk berbenah.
- c. Bagi Akademisi agar mengetahui informasi yang lebih menyeluruh bahwa subjek Manajemen Sumber Daya Manusia tidak hanya diperuntukkan bagi Perusahaan atau instansi besar namun juga dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- d. Bagi Penulis, penelitian ini sangat bermanfaat utamanya dalam menambah sudut pandang akan ilmu pengetahuan kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah sebagai salah satu pondasi perekonomian negeri, dan berharap nantinya dikemudian hari penulis dapat membangun pondasi serupa demi keberlangsungan hidup penulis, keluarga, orang sekitar atau bahkan masyarakat Indonesia.